

Suluh Media

Novita Tresiana

NEW PUBLIC SERVICE DAN MUSRENBANG DESA



**Sebuah Pengembangan Model Produksi
Kebijakan Publik yang Unggul**

NEW PUBLIC SERVICE DAN MUSRENBANG DESA

**Sebuah Pengembangan Model Produksi
Kebijakan Publik yang Unggul**

Novita Tresiana

Suluh Media

The logo for Suluh Media features the text "Suluh Media" in a bold, sans-serif font. A thin, curved line sweeps under the text from the left side, ending under the word "Media".

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tulisan : *New Public Service* dan Musrenbang Desa (Sebuah Pengembangan Model Produksi Kebijakan Publik Yang Unggul)

Penulis

Nama : Dr. Novita Tresiana, M.Si
NIP : 197209182002122002
NIND : 0018087205
Jabatan Fungsional/Pangkat : Lektor/III D
Unit Kerja : Tenaga Pendidik (Dosen) Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Publikasi : Buku Referensi
: Penerbit: Suluh Media Yogyakarta
: ISBN : 978-602-8610-05-6
: E-ISBN : 978-602-8610-06-3
: Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Tahun 2016
: Website : www.suluhmedia.co.id

Bandar Lampung, 30 Januari 2017

Dr. Novita Tresiana, M.Si
NIP. 197209182002122002

Ketua Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Mengetahui,
Dekan Fisip
Universitas Lampung



Dr. Syarif Makhya
NIP. 195908031986031003

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si
NIP. 1975070202003121002

Mengesahkan,
Ketua LPPM
Universitas Lampung



Dr. Warsono, Ph.D
196302161987031003

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
UNIVERSITAS LAMPUNG	
GL	03-02-2017
LB	0006/B/B/N/FISIP/2017
ENC	Buku
ARK	8

**New Public Service dan Musrenbang Desa; Sebuah Pengembangan Model
Produksi Kebijakan Publik yang Unggul**

oleh Dr. Novita Tresiana

Hak Cipta © 2016 pada penulis



Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Tresiana, Novita

New Public Service dan Musrenbang Desa; Sebuah Pengembangan Model Produksi
Kebijakan Publik yang Unggul/Novita Tresiana

- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: Suluh Media, 2016
xiv + 160 hlm.; 25 cm

Bibliografi.: 155 - 160

ISBN : 978-602-8610-05-6

E-ISBN : 978-602-8610-06-3

1. Ilmu Politik - Pemerintah Daerah

I. Judul

320.8

Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini



Kata Pengantar

Perspektif *new public service* (demokratik) dalam musrenbang desa bertujuan agar pemerintah mampu memproduksi *excellence public policy*, yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. *Excellence public policy* inilah yang menjadi barometer keberhasilan atau kegagalan negara (*failed state*) dalam konteks pembangunan desa. Mekanisme kerja perspektif ini dilakukan dengan meletakkan gagasan demokrasi (*deepening democracy*) pada tempat yang tepat, sebagai sebuah instrumen dan proses yang dipilih, dalam rangka menumbuh-kembangkan peran aktif partisipasi publik dalam musrenbang desa (*working democracy*), ke arah *deliberative democracy* sebagai sebuah tindakan nyata, yang berwujud forum interaksi dan diskusi diantara semua *local governance stakeholder* (pemerintah, *civil society*, pengusaha). Harapannya, kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud dan negara/pemerintah menjadi kuat.

Buku ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan perspektif *new public service* (demokratik) dalam musrenbang desa. Dimensi-dimensi penting dari perspektif *new public service* (demokratik) dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat pengembangan produksi kebijakan publik yang unggul. Keseluruhan bab dalam buku ini akan berisi uraian fakta-fakta empiris yang diambil dari hasil-hasil penelitian dan diperkuat melalui kajian

teoritik yang relevan. Melalui hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini, penulis mengajak para pembaca untuk mendeskripsikan, mengelaborasi kegagalan dan keberhasilan musrenbang desa sebagai media produksi kebijakan publik yang unggul, terutama dari kacamata masyarakat dan stakeholders. Seyogyanya, tujuan dan keberhasilan musrenbang desa adalah produksi kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan kepublikan.

Kehadiran buku ini dihadapan para pembaca, diharapkan dapat membuka wawasan tentang pentingnya membangun sebuah pengembangan kelembagaan dialog yang representatif dan familier, berbasis multistakeholder, hemat dan efisien, sebagai sebuah ruang publik baru yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pemerintah, masyarakat dan stakeholders menyadari pentingnya penguatan negara yang perwujudannya melalui penguatan masyarakat yang berbentuk penciptaan ruang baru, (*space of power*) bagi dialog dan keterlibatan masyarakat diikuti instrumen-instrumen berupa *responsiveness* pemerintah desa yang bergeser menjadi ruang untuk mendengarkan, perbaikan proses representasi, proses pengambilan keputusan, dan daya ikat keputusan forum representasi dan forum deliberasi warga desa, juga monitoring pembangunan desa.

Akhir kata, semoga berguna bagi para pembaca, khususnya yang menaruh minat pada perencanaan dan penyusunan kebijakan, khususnya sektor publik.

Penulis,

Dr. Novita Tresiana



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
DAFTAR GAMBAR	ix	
DAFTAR TABEL	xi	
BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	Musrenbang Desa: <i>Gagasan Deepening Democracy</i> dan Kegagalan Negara (<i>Failed State</i>)	2
1.2	Gambaran Umum Isi Buku	10
BAB 2	IMPLEMENTASI <i>NEW PUBLIC SERVICE</i> DALAM MUSRENBANG DESA	15
2.1	<i>New Public Service</i>	16
2.2	<i>New Public Service</i> dalam Musrenbang Desa	32
2.3	Kajian Evaluasi Model Musrenbang Desa dalam Menyusun Kebijakan dan Program Pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan	45
2.4	Kesimpulan	63

BAB 3	MEMBANGUN KEBIJAKAN PUBLIK YANG UNGGUL: MODEL KELEMBAGAAN YANG REPRESENTATIF DAN FAMILIER	65
3.1	Kebijakan Publik yang Unggul dan Involusi Kebijakan	67
3.2	Dimensi Ruang Publik Sebagai Basis Kelembagaan Produksi Kebijakan Publik yang Unggul	105
3.3	Kelembagaan yang Representatif dan Familier Berbasis Multistakeholders (<i>Multistakeholders Governance Body Models</i>): Sebuah Model Pengembangan Kelembagaan dalam Memproduksi Kebijakan Publik yang Unggul	113
3.4	Kesimpulan	130
BAB 4	PERAN ELABORASI MODAL SOSIAL DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL	133
4.1	Modal Sosial dalam Masyarakat	134
4.2	Model Kepemimpinan Transformasional Berbasis Elaborasi Kepemimpinan Masyarakat	141
4.3	Kesimpulan	149
BAB 5	PENUTUP	151
	DAFTAR PUSTAKA	155



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hakikat Musrenbang Demokratis	34
Gambar 2.2	Model <i>New Public Service</i> dalam Musrenbang Desa	41
Gambar 3.1	Model Deliberatif	110
Gambar 3.2	Gagasan <i>Post-Factum</i> dari <i>Deepening Democracy</i> di Desa	124
Gambar 3.3	Model <i>Multistakeholders Governance Body</i>	124
Gambar 4.1	Keterkaitan Visi Pendidikan Nasional, Visi Kota, Visi Disdikbudpora	143



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Analisa Perspektif OPA, NPM dan NPS	25
Tabel 2.2	Konsep dan Aplikasi Kepentingan	27
Tabel 2.3	Hakikat Demokrasi dalam Musrenbang Desa	34
Tabel 2.4	Dimensi Kelemahan Musrenbang 9 Desa di Kabupaten Lampung Selatan	49
Tabel 2.5	Tipologi Kebijakan/Program Desa di Kabupaten Lampung Selatan	50
Tabel 2.6	Pemetaan Dimensi-dimensi Kelemahan Musrenbang Desa	55
Tabel 3.1	Lapangan Usaha/Pekerjaan Penduduk Kabupaten Lampung Selatan	75
Tabel 3.2	Jumlah KK Berdasarkan Pentahapan Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Selatan	75
Tabel 3.3	Kategorisasi Desa-desa di Kabupaten Lampung Selatan	75
Tabel 3.4	Masalah/Kebutuhan Versi Masyarakat dan Penetapan Program Pemerintah Desa Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan	79
Tabel 3.5	Masalah/Kebutuhan Masyarakat dan Penetapan Program Pemerintah Desa Budi Lestari Kabupaten Lampung Selatan	81

Tabel 3.6	Masalah/Kebutuhan Masyarakat dan Penetapan Program Pemerintah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan	87
Tabel 3.7	Masalah/Kebutuhan Masyarakat dan Penetapan Program Pemerintah Desa Margo Mulyo Kabupaten Lampung Selatan	89
Tabel 3.8	Masalah/Kebutuhan Masyarakat dan Penetapan Program Pemerintah Desa Merak Batin Kabupaten Lampung Selatan	90
Tabel 3.9	Masalah/Kebutuhan Masyarakat dan Penetapan Program Pemerintah Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan	92
Tabel 3.10	Masalah/Kebutuhan Masyarakat dan Penetapan Program Pemerintah Desa Pemanggilan Kabupaten Lampung Selatan	93
Tabel 3.11	Masalah/Kebutuhan Masyarakat dan Penetapan Program Pemerintah Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan	97
Tabel 3.12	Masalah/Kebutuhan Masyarakat dan Penetapan Program Pemerintah Desa Suka Marga Kabupaten Lampung Selatan	98
Tabel 3.13	Tipologi Kebijakan/ Program Desa di Kabupaten Lampung Selatan	103
Tabel 3.14	Jumlah dan Bentuk Organisasi Grassroots di Kabupaten Lampung Selatan	116
Tabel 3.15	Keterkaitan Profesi dan Latar Belakang Aktor Pendiri dengan Lembaga/Organisasi Lokal di Kabupaten Lampung Selatan	119
Tabel 3.16	Pola Afiliasi (Ikatan) Berdasarkan Kecenderungan Orientasi Kegiatan Kelembagaan Lokal di Kabupaten Lampung Selatan	119
Tabel 3.17	Media dan bentuk/pola partisipasi lembaga dalam perumusan program	120

Tabel 3.18	Kecenderungan Nilai Lembaga Lokal di Kabupaten Lampung Selatan	121
Tabel 4.1	Identifikasi Modal Sosial yang Diperlukan di Kabupaten Lampung Selatan	139
Tabel. 4.2	Realisasi Anggaran Pendidikan Kota Metro	143
Tabel 4.3	Respon Persepsional Kreasi Kebijakan dan Program Wujud Nyata Inovasi	144

BAB 1

Pendahuluan

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) adalah forum deliberatif (musyawarah) perumusan kebijakan /program desa yang interaktif, yang disusun bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan musrenbang desa adalah keterlibatan aktif multi stakeholders yang ada di desa, dalam bentuk peran serta, musyawarah, negoisasi dan dukungan. Dalam perspektif penyusunan kebijakan publik, maka musrenbang desa menggambarkan model kebijakan deliberatif yang menekankan pada pelibatan argumentasi-argumentasi dari para pihak, musyawarah dan negoisasi dari pihak-pihak diluar pemerintah desa. Model deliberatif inilah yang dianggap sebagai pengejawantahan dari konsep *deepening democracy*, yang hasilnya diharapkan akan mampu memproduksi *excellence public policy* dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika hal itu tidak tercapai, maka pemerintah dikatakan sebagai negara gagal (*failed state*), di mana musrenbang desa yang seyogyanya merupakan kelembagaan forum deliberatif (musyawarah) yang resmi dan formal sudah tersedia, namun ternyata belum mampu memproduksi kebijakan/program pembangunan yang unggul. Pandangan inilah yang harus dijadikan barometer keberhasilan pemerintah desa dalam pembangunan.

Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam buku ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam memproduksi

kebijakan publik yang unggul (*excellence public policy*) melalui forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa), sehingga kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa bisa terwujud. Solusi yang ditawarkan sebagai metode pemecahan masalah tersebut adalah implementasi perspektif *new public service* (demokratik), melalui model ketersediaan ruang publik dan kelembagaan yang representatif, familier dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa, dimensi peran elaborasi modal sosial dan kepemimpinan transformasional dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, berdasarkan data-data empirik dan diperkuat oleh kajian teoritik yang relevan.

Pada bab pendahuluan ini diuraikan pentingnya perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa) sebagai sebuah proses deliberatif yang diharapkan mampu memproduksi program-program yang unggul. Uraian pada bab pendahuluan ini sebagai *entry point* pada pembahasan dan kajian yang lebih rinci tentang perspektif *new public service* (demokratik), terutama dari model kelembagaan representatif dan familier serta dan dimensi peran elaborasi dan kepemimpinan. Kajian dalam bab pendahuluan ini akan diperkuat dengan hasil-hasil penelitian (studi) yang relevan serta berlandaskan kajian-kajian teoritik agar memiliki bobot pertanggungjawaban akademik yang memadai. Pada bagian akhir bab pendahuluan ini, diuraikan gambaran umum keseluruhan isi buku dengan maksud untuk menghantarkan pembaca pada pembahasan yang lebih rinci.

1.1 Musrenbang Desa: Gagasan *Deepening Democracy* dan Kegagalan Negara (*Failed State*)

Pada awalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistis dianggap lebih dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Apalagi dalam paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, peran negara (pemerintah) sebagai aktor utama dan mengarahkan proses pembangunan mensyaratkan sentralisasi dalam kewenangan agar peran pemerintah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Namun ke-

wenangan yang serba terpusat, ternyata memunculkan efek negatif yang menyebabkan praktik kekuasaan menjadi otoriter. Yang terjadi kemudian, kapasitas pemerintah mulai menurun (Fukuyama, 2005).

Sentralisasi dalam penyelenggaraan pembangunan, ternyata tidak sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi mayoritas warga masyarakat untuk mendapat akses yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Kesenjangan yang terjadi memunculkan ketidakpuasan pada berbagai kalangan, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan akibat kebijakan pembangunan yang serba terpusat.

Pada dekade 1980-an, sebagai reaksi terhadap peran negara yang meluas, baik dinegara-negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang, kaum liberal menawarkan alternatif deregulasi, de-birokratisasi dan privatisasi sebagai bagian dari upaya mereformasi diri pemerintah. Alternatif tersebut diyakini dapat menjadi penggerak perubahan ekonomi, karena dengan memangkas intervensi ekonomi negara ke tingkat yang minimal, maka pasar dapat bergerak lebih leluasa untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Dalam beberapa hal, alternatif tersebut membawa hasil-hasil yang menggembirakan, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan integrasi pasar (Fukuyama, 2005). Namun dalam beberapa hal lain, peran negara yang berkurang dalam ekonomi juga terkait dengan penurunan kapasitas negara untuk melakukan fungsinya memang diperlukan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal inilah yang memunculkan fenomena kegagalan negara.

Kegagalan negara (*failed state*) dalam konteks pembangunan desa, adalah suatu kondisi dimana pemerintah tidak memiliki kapasitas *governability*, yang ditandai dengan rendahnya kapasitas pemerintah dalam penyediaan *public goods*. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan *public goods* terdelegasikan secara terpisah-pisah. Negara justru menyerahkan fungsi mereka sebagai penyedia barang-barang publik kepada kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan sepihak. Keamanan hanya tersedia di kota-kota utama, infrastruktur ekonomi jatuh, sistem perawatan

kesehatan mengalami penurunan dan sistem pendidikan berada dalam ketidakjelasan. *Failed states* biasanya mempunyai kaum minoritas kaya raya yang selalu mengambil keuntungan dari *failed system* yang ada.

Ciri-ciri *failed state* antara lain: (a) selalu diwarnai adanya disharmoni antara komunitas, tidak bisa menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat; (b) negara hanya menjamin keamanan pada ibukota saja; (c) dimilikinya institusi desa yang lemah, baik sisi eksekutif maupun sisi legislatif; (d) tidak ada debat-debat yang demokratis di ranah publik; (e) lembaga yudikatif tidak independen, dan lebih sekedar kepanjangan tangan eksekutif, masyarakat pun tidak mendapatkan keadilan di sistem pengadilan, apalagi berhadapan dengan negara; (f) birokrasi dalam waktu yang cukup lama kehilangan tanggung jawab profesional mereka, mereka hanya mementingkan kepentingan eksekutif semata dengan cara yang halus menekan warganya; (g) militer masih memungkinkan menjadi satu satunya institusi yang memiliki integritas, namun mempunyai kecenderungan terpolitisasi secara kuat, aparat keamanan cenderung menjadi negara dalam negara; (h) menyediakan kesempatan ekonomi yang tidak paralel, hanya pada segelintir orang yang punya hak *privilege*; (i) tanggungjawab pemerintah desa untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi warganya sama sekali tidak ada; (j) korupsi menggurita dalam skala yang luas; dan (k). pada beberapa kasus, *chaos* ekonomi yang dikombinasikan dengan bencana kemudian menimbulkan adanya bencana kelangkaan makanan dan kelaparan yang meluas; (l) negara kehilangan legitimasi dasar mereka di saat batas wilayah mereka menjadi tidak relevan lagi bagi sekelompok kekuatan yang mencoba menggalang kekuatan; (m) warga justru makin menguat loyalitas komunitasnya dan menjadikannya sebagai sumber keamanan dan kesempatan ekonomi. Seiring dengan fenomena tersebut berakibat legitimasi negara makin lemah di mata warganya. Alih-alih menjadi profesional, peran negara yang berkurang justru menyebabkan negara semakin lemah, sehingga memunculkan pemikiran baru untuk memperkuat negara (Fukuyama, 2005). Elemen dasar negara yang kuat ditandai otoritas yang efektif dan terlembaga. Perdebatan yang kemudian muncul terkait dengan upaya

memperkuat negara adalah sejauhmana lingkup peran dan kapasitas negara yang diperlukan untuk mewujudkan negara yang kuat itu.

Gagasan *Deepening democracy* (dalam Nugroho, 2012) merupakan sebuah konsep dan gagasan dunia internasional melalui UNDP tentang perlunya memperkuat negara melalui pendalaman demokrasi, yang diakui sebagai obat mujarab pencapaian tujuan reformasi pemerintah daerah di Indonesia. Tesisnya, politik akan menentukan keberhasilan pembangunan. Pembangunan berjalan dengan baik jika semua orang punya hak untuk menentukan arah politik, karenanya harus dilakukan memperdalam kualitas demokrasi, melalui nilai-nilai transparansi (kebebasan, keterbukaan), partisipasi dan akuntabilitas yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aplikasi gagasan *deepening democracy* pada aras pemerintah daerah diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk program. *Pertama*, proses politik, yaitu praktik pemilu langsung pada level daerah (pilkada dan pileg/DPR daerah). *Kedua*, proses ketatalaksanaan institusi/pemerintah daerah sebagai salah satu dimensi penting manajemen publik, yaitu pada praktik pemekaran wilayah dan perencanaan berbasis partisipatif. Dalam aspek demokratisasi desa, maka *deepening democracy* diwujudkan dalam sebuah forum deliberatif berupa kelembagaan dan proses yang dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa).

Musrenbang desa merupakan upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai langkah mewujudkan perencanaan partisipatif di mana masyarakat sebagai salah satu komponen dalam *development policy stakeholders* harus diberdayakan dan diikutsertakan dalam proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembangunan). Proses yang demikian ini tentu saja menginginkan munculnya rasa memiliki (*sense of belonging*), ikut terlibat (*sense of participation*) dan ikut bertanggungjawab atas berhasilnya usaha-usaha pembangunan (*sense of accountability*) sehingga pengelolaan pembangunan desa benar-benar mencerminkan *community based resource paradigm*. Meminjam istilah Islamy (2004), maka Musrenbang desa haruslah dilihat sebagai *share authority* diantara para stakeholders pembangunan, di mana proses pembangunan

tidak didominasi oleh satu pihak saja tetapi merupakan usaha bersama yang didasarkan pada nilai bersama (*shared values*), visi bersama (*shared vision*), dan misi bersama (*shared mission*).

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil melalui musrenbang desa partisipatif ini, yaitu: (a) masyarakat mulai belajar diberdayakan otoritas peran dan fungsinya sehingga mereka mulai terlatih bertanggung-jawab atas pelaksanaan dan hasil dari keputusan bersama; (b) kualitas keputusan Musrenbang Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) menjadi lebih bermutu karena terkait secara langsung dengan persoalan, kepentingan dan kebutuhan warga desa sehingga akan berdampak pada produktivitas hasil yang dicapai; (c) adanya komitmen kuat masyarakat desa atas keputusan yang mereka ikut buat sendiri sehingga menambah semangat dan kepuasan untuk mewujudkan apa yang mereka ikut putuskan (Tresiana dan Duadji, 2015).

Urgensi keterlibatan masyarakat mengingat, sebagai sebuah forum maka musrenbang desa itu terkait dengan beberapa hal substantif sebagai berikut: *Pertama*, berkenaan dengan konteks perencanaan pembangunan desa, yaitu upaya melakukan identifikasi persoalan dan kebutuhan warga desa yang disertai dengan justifikasi program dan pembiayaan untuk mengatasi persoalan dan pemenuhan kebutuhan warga desa tersebut. *Kedua*, berkenaan dengan komposisi kepesertaan yang terlibat dalam forum Musrenbang Desa. Pada konteks ini sesungguhnya Musrenbang Desa bersifat terbuka bagi semua komponen warga desa, baik secara pribadi, wakil kelompok maupun yang berkedudukan sebagai aparatur pemerintahan desa (Tresiana dan Duadji, 2015).

Lebih lanjut hasil penelitian Duadji (2012) menunjukkan bahwa ada beberapa dasar pertimbangan mengapa Musrenbang Desa bersifat terbuka, yaitu: (a) informasi kompresif yang mengakar dari bawah sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual yang terjadi; (b) terjadinya proses pembelajaran dan pertukaran dalam interaksi sosial ke-masyarakatan yang akan menumbuhkan semangat kebersamaan (solidaritas), jalinan mental (psikis), rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif atas semua hal yang terjadi di lingkup desa; dan (c) terciptanya

sharing pengetahuan, kemampuan (*skill*) dan ide-ide inovatif untuk kemajuan desa.

Paralel dengan di atas, esensi pentingnya Stakeholders Musrenbang Desa dinyatakan Islamy dalam Duadji dan Tresiana (2015): “Stakeholders Musrenbang Desa, dalam pengertian luasnya menunjuk pada semua warga desa tanpa ada pengecualian; namun dalam konteks pelaksanaan Musrenbang Desa adalah pemangku kepentingan. Artinya keterwakilan dari semua elemen warga yang ada di desa yang terdiri dari unsur aparaturnya pemerintahan desa; elemen-elemen kelompok atau lembaga swadaya masyarakat; lembaga grassroots; dan pihak swasta, karena tidak mungkin setiap warga dapat mengikuti forum Musrenbang Desa”.

Sayangnya, setelah lebih dari 13 tahun, pencangkakan dan implementasi gagasan *deepening democracy* hampir di seluruh provinsi/kabupaten/kota/desa di Indonesia, termasuk kabupaten/kota/desa di wilayah Provinsi Lampung mengalami kegagalan, tidak mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Studi kasus untuk pemerintah lokal, hasil penelitian yang dilakukan oleh Tresiana dan Duadji (2015) di salah satu kabupaten, yakni Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, mendapati banyaknya kegagalan pemerintah daerah dalam penyediaan *public goods* di desa, walau sesungguhnya musrenbang desa sebagai forum deliberatif sudah tersedia, namun ternyata forum deliberatif ini belum mampu memproduksi kebijakan/program pembangunan yang unggul. Beberapa persoalan yang menjadi sumber kegagalan diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, fenomena kegagalan pemerintah, di mana warga desa mendesak perlunya peningkatan kualitas kehidupan melalui penyediaan barang-barang publik yang diperlukan warga, sekaligus juga melalui demokratisasi pembangunan desa. *Kedua*, kegagalan justru terletak pada gagasan konsep *deepening democracy* yang merupakan resep dari UNDP, ditengarai jika diterapkan di desa, akan merupakan obat mujarab untuk mengatasi kegagalan pembangunan desa. Tesisnya, pembangunan berjalan dengan baik jika semua warga punya hak untuk menentukan arah politik, karenanya perlu pendalaman kualitas demokrasi, melalui nilai-nilai

keterlibatan (partisipasi) warga desa, yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, pemilihan musrenbang desa sebagai fokus utama menjadi penting untuk melihat kegagalan negara dalam memproduksi kebijakan yang unggul di dasari pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, musrenbang desa merupakan forum deliberatif (musyawarah) perumusan kebijakan/program desa yang interaktif, seharusnya disusun bersama antara Pemerintah dan masyarakat. *Kedua*, tolok ukur keberhasilan musrenbang desa adalah keterlibatan aktif *multistakeholders* yang ada di desa, dalam bentuk peran serta, musyawarah, negoisasi, dukungan, sehingga mampu menanggulangi persoalan dan kemiskinan masyarakat. *Ketiga*, dalam perspektif kebijakan publik, maka musrenbang desa menggambarkan model kebijakan deliberatif (musyawarah) yang menekankan pada pelibatan argumentasi-argumentasi dari para pihak, musyawarah dan negoisasi dari pihak-pihak diluar pemerintah desa. Model deliberatif (musyawarah) inilah yang dianggap sebagai pengejawantahan dari konsep *deepening democracy*, yang diyakini mampu menghasilkan *excellence public policy* (kebijakan publik yang unggul), dan mampu menanggulangi kemiskinan masyarakat desa.

Secara makro, dalam tulisan ini, kerangka gagasan dalam memahami kegagalan negara sekaligus memberikan solusi bagi pemerintah desa dalam menyediakan *public goods* dilakukan melalui melalui elaborasi konsepsi *deepening democracy* (dalam Nugroho, 2012) dan konsepsi *deliberative Policy, dynamic governance* dengan titik tekan penguatan pemerintah melalui *excellence public policy* (dalam Hajer dan Wagenaar, 2003; Siong Neo dan Geraldine, 2009). Gagasan *Deepening democracy* (dalam Nugroho, 2012), intinya mengharuskan perlunya pendalaman demokrasi melalui keterlibatan dan peran aktif semua warga dalam kebijakan/program desa, mulai dari perumusan, implementasi sampai evaluasi. Kekuatan gagasan ini adalah pada proses demokrasinya, bukan pada hasil/output demokrasi. Hal inilah yang memunculkan ketidakpuasan dan fenomena kegagalan pemerintah dalam penyediaan barang public. Gagasan *deepening democracy* melalui musrenbang desa menurut penulis,

tentunya masih tetap diperlukan bagi tumbuh kembangnya demokratisasi, namun yang lebih penting adalah mereorientasi, merevitalisasi dan meletakkan gagasan *deepening democracy* pada tempat yang tepat dan sesuai untuk menumbuh-kembangkan peran aktif (partisipasi publik) dalam musrenbang desa, sehingga dapat dihasilkan output kebijakan dan program pembangunan yang menjadi solusi masalah dan senyatanya berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karenanya penulis melihat, ada mata rantai yang terputus. *Deepening democracy* seolah-olah dipandang sebagai tujuan, padahal ia hanya alat dan proses yang dipilih. Demokrasi yang diharapkan di desa, tentunya adalah *working democracy*. Artinya perlu diakhiri dengan tindakan nyata untuk membuka forum interaksi dan diskusi diantara semua *local governance stakeholder* (pemerintah, *civil society*, pengusaha), guna menggodok kebijakan dan program pembangunan yang unggul (*excellence policy*), sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa diwujudkan dan negara/pemerintah menjadi kuat. Pada titik inilah, pentingnya pergeseran *deepening democracy* kearah *deliberative democracy* perlu dilakukan sehingga *excellence policy* akan dapat diproduksi oleh *local governance stakeholders*.

Penelitian yang dilakukan oleh Tresiana dan Duadji (2015) yang berjudul: Kegagalan Pemerintah Lokal dalam Pembangunan Era Otonomi Daerah (Kebijakan Deliberatif: Menggagas Multistakeholders Governance Body dalam Musrenbang Desa untuk Mewujudkan Kebijakan/Program), memberikan gambaran eksistensi dari musrenbang dalam konteks negara kuat, bahwasanya sebuah pemerintahan desa yang kuat, hanya dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas pemerintah dengan membangun kebijakan publik yang unggul (*excellence public policy*), dikembangkan dalam ruang yang dikenal dan representatif, dalam konteks dan proses yang demokratis, musyawarah (deliberatif), dan menjadi elemen strategis bagi penyediaan kebutuhan barang-barang publik yang diperlukan oleh warganya, sekaligus juga memberikan jaminan kebebasan, ketertiban dan keamanan. Karenanya, perlu mencari penguatan dan mendudukan kembali pemahaman yang benar dalam berdemokrasi. Demokrasi haruslah dimaknai sebagai proses awal (primer) untuk mendorong terbukanya

upaya interaksi masing-masing stakeholders untuk bersinergi, saling memperkuat, mengawasi (*check and balance*) dan menegosiasikan kepentingan mereka. Proses lanjutan (sekunder) adalah eksistensi *strong governance*, substansi kebijakan mengakar dari konteks lokal dalam mengimplementasikan konsensus bersama antar *local stakeholders governance*, adanya ruang publik sebagai wujud kuatnya pemerintah untuk meraih tujuan, yaitu keberhasilan memproduksi kebijakan/progam yang unggul. Tanpa adanya gagasan seperti ini, sulit rasanya bagi kebijakan dan program pembangunan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

1.2 Gambaran Umum Isi Buku

Uraian buku ini berfokus pada upaya menemukan titik kompromi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholders lainnya untuk menemukan rumusan yang tepat dalam mengatasi kegagalan negara (*failed state*) dalam konteks pembangunan desa melalui penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang memiliki tingkat keunggulan dan layanan publik yang baru. Hal ini sekaligus menjadi sebuah pemodelan baru dalam layanan publik melalui praktik pengembangan kelembagaan yang paling relevan, representatif, familier dan dekat dengan masyarakat.

Untuk membahas perspektif tersebut, isi buku ini terdiri dari 4, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua berisi Implementasi perspektif *new public service* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), bab ketiga tentang menyusun kebijakan dan program pembangunan yang unggul melalui model kelembagaan yang representatif dan familier, bab keempat tentang peran elaborasi modal sosial dan kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan, bab kelima penutup. Keseluruhan isi pembahasan dilakukan dengan pendekatan empirik, berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pendekatan teoritik.

Pada bab kedua secara rinci diuraikan bagaimana perspektif *new public service* diimplementasikan dalam musyawarah rencana pem-

bangunan desa (musrenbang desa). Judul bab ini diinspirasi oleh realita empirik hasil musrenbang desa justru berupa kebohongan publik, demokrasi semu dan tidak menyelesaikan persoalan masyarakat. Idealnya musrenbang desa merupakan forum deliberatif (musyawarah) perumusan kebijakan/program desa yang interaktif, seharusnya disusun bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan musrenbang desa adalah keterlibatan aktif *multi stakeholders* yang ada di desa, dalam bentuk peran serta, musyawarah, negoisasi, dukungan, sehingga mampu memberikan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks ini, maka musrenbang desa menggambarkan model kebijakan deliberatif yang menekankan pada pelibatan argumentasi-argumentasi dari para pihak, musyawarah dan negoisasi dari pihak-pihak di luar pemerintah desa.

Pada bab ketiga menguraikan tentang model kelembagaan yang representatif dan familier, berupa forum warga, berbasis multistakeholder, sebagai sebuah ruang publik baru dalam memproduksi kebijakan dan program yang unggul. Gagasan model pengembangan dalam rangka penguatan kapasitas pemerintah melalui penguatan kelembagaan, yang merupakan pemanfaatan ruang baru, *space of power* bagi dialog dan keterlibatan masyarakat memerlukan instrumen-instrumen berupa perbaikan proses representasi, proses pengambilan keputusan, dan daya ikat keputusan forum reprenstasi dan forum deliberasi warga desa dalam pembuatan kebijakan/program desa publik dan monitoring pembangunan desa. Selain itu perlu disusun perancangan praktik praktik partisipasi warga di tingkat lokal yang manfaatnya langsung dapat dirasakan baik oleh warga maupun oleh pemerintah yang berkuasa. Dukungan instrumen hukum dan kebijakan yang lebih operasional tentunya sangat diperlukan dalam praktik partisipasi warga desa, sehingga partisipasi warga tidak dijadikan hanya sebagai alat konsolidasi sumber daya lokal, maka praktik dan kebijakan partisipasi warga desa harus berdampak langsung pada perubahan relasi kekuasaan yang mendorong terjadinya pendalaman demokrasi dan penciptaan keadilan antar kelompok masyarakat, antar gender. Kerjasama ini terutama difokuskan untuk memanfaatkan ruang baru partisipasi warga desa yang telah diberikan oleh hukum menjadi

praktik. Selanjutnya, berbagai praktik yang pernah ada, masih hidup dan bahkan telah sukses dapat dijadikan rujukan untuk merancang kebijakan partisipasi warga yang lebih operasional. Wujud ruang baru bagi kesuksesan musrenbang desa adalah pembentukan sebuah forum deliberatif, di mana warga bicara berdasarkan tematisasi isu-isu yang bersumber pada pengetahuan dan kapasitas warga. Di sisi lain, perhatian dan bentuk *responsiveness* pemerintah desa menjadi ruang untuk mendengarkan, sehingga proses tersebut, membuktikan tidak ada kekuasaan yang memiliki kesempurnaan, selalu memerlukan interaksi sehari-hari dengan para warga, untuk mendengarkan suara mereka, dan menjadikan pendapat-pendapat mereka sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan keputusan itu dibuat bersama. Di sinilah ruang-ruang sebagai *space of power* itu terjadi.

Pada bab keempat secara khusus membahas peran elaborasi modal sosial dan kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagai dimensi yang sangat potensial bagi bekerjanya kelembagaan yang representatif dan familier dalam memproduksi kebijakan dan program yang unggul. Modal sosial berpotensi sebagai energi penggerak, media membangun *trust* diantara masyarakat dan pemerintah, maupun diantara masyarakat sendiri. Modal sosial inilah yang kemudian menggiring para stakeholders untuk membentuk dan memanfaatkan ruang baru untuk kebutuhan pembangunan. Sedangkan partisipasi dimotori kepemimpinan merupakan nilai dasar demokrasi yang dilihat dari kemanfaatannya dapat meningkatkan kualitas keputusan sebagai hasil kebijakan. Partisipasi juga bermanfaat untuk membangun komitmen masyarakat untuk menjalankan keputusan kebijakan. Arti penting partisipasi juga terletak pada sarana swa edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik, sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.

Bab kelima merupakan bagian akhir buku ini yang berisi kata penutup (*closing statement*), sebagai rangkuman dari keseluruhan uraian dalam buku. Pada bab ini juga dikemukakan beberapa rekomendasi guna menghasilkan kebijakan dan program pembangunan yang unggul, yang mampu mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat.

-oo0oo-



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Interoensi Komunitas*. Jakarta : Lembaga Penelitian FE-UI, Jaka Lingkungana.
- Akadun. 2011. *Revitalisasi Forum Musrenbang Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. XXVII Nomor 2, Desember, pp.183-191
- Alexander, E. R.2002. *The Publik Interest in Planning: From Legitimation to Substantive Evalution*. dalam *Planning Theory*, Vol. 1 No. 3.
- Baiocchi, Gianpaolo. 2003. *Emergent Public Spheres: Talking Politics in Participatory Governance*, *American Sociological Review*. 2003. Vol 68, February: pp. 52-74.
- Bass, Bernard dan Riggio,Ronald. 2006. *Transformational Leadership (Second Edition)*. London : Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Bertucci, Guido. 2008. *The State and International Development Management: Commentary from International Development Management Practitioners*, *Public Administration Review*. Nov/Dec. 2008, pp. 1002 - 1008.
- Bovaird, Tony and Elke Loffler (ed.) 2003. *Public Management and Governance*. London: Routledge

- Box, R.C. 1998. *Citizen governance: Leading American communities into the 21st century*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Carson, Lyn and Janette Hartz-Karp (2005), *Adapting and Combining Deliberative Designs*. dalam Gastil, John and Peter Levine (eds) (2005), *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*. Jossey-Bass, San Francisco, pp. 120-138.
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development: Putting the Last First*. John Wiley & Sons, Inc.
- Coleman, J.S. 2000. *Social Capital in The Creatin of Huma Capital*. In Partha Dasgupta and Ismail Serageldin. *Social Capital A Multifaceted Perspective*. Washington DC: The World Bank.
- De Vries, Michiel S.2005. *Generations of Interactive Policy-making in the Netherlands*, dalam *International Review of Administrative Sciences*, Vol. 71, No. 4.
- Denhardt, Janet dan Denhardt, Robert. 2013. *Pelayanan Publik Baru : Dari Manajemen Steering Ke Serving*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Djohani. 2008. *Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Warga dalam Pelayanan Publik*. Bandung: FPPM dan Ford Foundation.
- Duadji, N dan N, Tresiana. 2015. *Laporan Akhir Tahap II Penelitian Stranas: Public Service Delivery Model (Pemetaan Organisasi Grassroots dan Pembentukan Governance Sounds Berbasis Lembaga Adat Untuk Menciptakan Ruang dan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung: Tidak Diterbitkan.
- Duadji, Noverman. 2012. *Evaluasi PNPM Mandiri di Kota Bandar Lampung*. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran: Tidak Diterbitkan

- Duadji, Noverman. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik: Wacana Konsep, Teori dan Problema Pelayanan Publik*. Bandar Lampung. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Dunn, W.N. 2000. *Analisa Kebijakan Publik*. Terjemahan Muhajir Darwin. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Farazmand, Ali (ed). 2004. *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*. Westport Connecticut: Praeger Publishers.
- Fiisabilillah, Vidayani dan Hudalah. 2014. *Peran Modal Sosial Dalam Kerjasama Antar Daerah Kartamantul*. *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. 30 Nomor 2, Desember, pp.209-219
- Fischer, Frank. 2003. *Beyond Empiricism: Policy Analysis as Deliberative Practice*; dalam Hajer, Marteen, & Henderik Wagenaar, eds., (2003). *Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in The Network Society*. Cambridge: University Press, pp. 209 - 227.
- Fishkin, James S. 2009. *When the People Speak: Deliberative Democracy & Public Consultation*. New York: Oxford University Press.
- Friedmann, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: Blackwell Publisher.
- Fukuyama, Francis. 2002. *The Great Disruption*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara*. Jakarta: Gramedia
- Gary L. Wamsley, and James F. Wolf (ed.). 1996. *Refounding Democratic Public Administration: Modern Paradoxes, Postmodern Challenges*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Gaventa, J. &Valderama, C. 2001. *Participation, Citizenship and Local Government: Background Note Prepared for Workshop on Strengthening Participation in Local Governance*. Institute of Development Studies.

- Hajer, Maarten, A. and Henderik Wagenaar (eds). 2003. *Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in The Network Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Handoyo, Eko. 2013. *Kontribusi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pascarekolasi*. *Journal Komunitas* 5 (2) p: 252-266.
- Hardiman, F. Budi. 2004. *Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto*, dalam *Majalah Basis* Nomor 11-12, Tahun ke 53, November-Desember 2004, hal. 14 - 31.
- Igbal, M. 2007. *Concept and Implementation of Participation and Empowerment: Reflection from The Coffee IPM-SECD*. *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 11, No. 2, hal. 58-70.
- Islamy, I. 2004. *Policy Analysis: Seri Monografi Kebijakan Publik Malang*. Program Pascasarjan Unibraw.
- Keban, Yeremis. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media.
- Kim, Pan Suk. 2010. *Building Trust By Improving Governance: Searching for a Feasible Way for Developing Countries*, *Public Administration Quarterly*, Fall. 2010: pp. 271-299
- King, C.S. & Stivers, C. 1998. *Government Is Us: Public Administration In An Anti-Government*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Kusumastuti, Ayu. 2015. *Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur*, *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 20 (1): 81-97.
- Lampung Selatan dalam Angka*. BPS Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014
- Lindblom, Charles E. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Little, J.H. 1996. *Thinking Government: Bringing Democratic Awareness to Public Administration in Norton, A. International handbook of Local and*

- Regional Government: a Comparative Analysis of Advanced Democracies*. Cheltenham: Edwar Elgar.
- Mariana, Caroline dan Heru Nuraksa. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Malang: Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA Universitas Brawijaya.
- Mulyawan, Rahman. 2012. *Penguatan Civic Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan*. *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. 28 Nomor 2, Desember, pp.157-162
- Narayan, Deepa. 1999. *Bonds and Bridges Social Capital and Poverty (Policy Research Working Paper 2167)*. Washington DC: The World Bank
- Neo, Boon Siong & Chen, Geraldine. 2009. *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd.
- Neo, Boon Siong & Chen, Geraldine. 2009. *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Nugroho, Riant (2012), *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta;
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pesch, Udo. 2008. *The Publicness of Public Administration*. *Administration & Society*, Vol 40 No. 2, April 2008; pp. 170-193
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster Paperbacks.

- Sakina, Ayu Widya. 2011. *Memahami Modal Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Muntulan dan Desa Gunungpring, Kabupaten Magelang*. Yogyakarta: Skripsi Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIP UGM. Tidak Dipublikasikan.
- Sumanto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Toha, M. 2009. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta: UGM.
- Toha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Tresiana, N dan Duadji, N. 2015. *Laporan Akhir Tahun Pertama Penelitian Fundamental: Kegagalan Pemerintah Lokal dalam Pembangunan Era Otonomi Daerah (Kebijakan Deliberatif: Menggagas Multistakeholders Governance Body dalam Musrenbang Desa untuk Mewujudkan Kebijakan/Program*. Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung. Tidak Dipublikasikan.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
- Wahab, S. A. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yulianto, Novita Tresiana dan Noverman Duadji. 2013. *Laporan Akhir Jurusan Administrasi Publik: Model kepemimpinan transformatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro*. Lampung : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung. Tidak Dipublikasikan.